

OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ariyandi Ramadhan
NPP. 30.0966

Asdaf Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Program Studi Keuangan Publik
ariyandir4@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Marja Sinurat, M.Pd., M.M

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): Optimization of Administration of Regional Property consists of 3 components, namely: bookkeeping, inventory, and reporting on Regional Property of Kutai Kartanegara Regency because there are still many findings of the Supreme Audit Agency on the administration of regional property, especially on the completeness of recording regional property. **Objective:** The purpose of the researcher is to find out how to optimize the administration of regional property, obstacles to the administration of regional property and efforts to resolve the obstacles encountered. **Method:** The method used is descriptive qualitative by taking an inductive approach and data collection techniques using interviews, documentation, and observation methods. The data analysis steps used are data collection, data reduction, data presentation, and verification/conclusion drawing. The research uses the theory of Fixed Asset Administration which has dimensions: Bookkeeping, Inventory, and Reporting. **Results/Findings:** The results of the study show that the administration of regional property in the Kutai Kartanegara district is optimal, but there are still problems with past regional property, In its implementation there are still several obstacles, namely, in human resources, employee motivation, regulations, and the SIMDA BMD application, the government has made efforts to hold training every year, provide honorarium according to workload, compile and adjust the latest regulations, and conduct periodic maintenance on the SIMDA BMD application. **Conclusion:** The researcher concluded that the administration of regional property can be said to be optimal and the administration of regional property has an influence on financial reports on local governments, suggestions from the author that the Regional Financial and Asset Management Agency of Kutai Kartanegara Regency can provide more understanding to employees about the administration of regional property because it is very vital in the management of regional property.

Keywords: Optimization, Administration of BMD, Accountability of Financial Statements

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Optimalisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah terdiri dari 3 komponen yaitu: pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan pada Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dikarenakan masih banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada penatausahaan barang milik daerah terutama pada kelengkapan pencatatan barang milik daerah. **Tujuan:** Tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi penatausahaan barang milik daerah, hambatan penatausahaan barang milik daerah serta upaya penyelesaian pada hambatan yang ditemui tersebut. **Metode:** Metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan melakukan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, serta observasi. Adapun langkah-langkah analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi/penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori Penatausahaan Aset Tetap yang mempunyai dimensi: Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan barang milik daerah pada kabupaten Kutai Kartanegara sudah optimal, namun masih ada permasalahan barang milik daerah masa lalu, Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yaitu, pada sumber daya manusia, motivasi pegawai, regulasi, serta aplikasi SIMDA BMD, pemerintah sudah melakukan upaya mengadakan pelatihan setiap tahun, memberikan honorarium sesuai dengan beban kerja, menyusun dan menyesuaikan regulasi terbaru, dan melakukan *maintenance* berkala pada aplikasi SIMDA BMD. **Kesimpulan:** Peneliti menyimpulkan penatausahaan barang milik daerah dapat dikatakan optimal dan pada penatausahaan barang milik daerah

mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan pada pemerintah daerah, saran dari penulis agar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat lebih memberikan pemahaman kepada para pegawai tentang penatausahaan barang milik daerah karena sangat vital dalam pengelolaan barang milik daerah.

Kata Kunci: Optimalisasi, Penatausahaan BMD, Akuntabilitas Laporan Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan barang milik daerah, paradigma terkini yang ada dalam pengelolaan barang milik daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan karena diperbaharainya tentang Penjualan kendaraan perorangan dinas guna tertib administrasi dan mendapat kepastian hukum, diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah karena semakin berkembang dan kompleksnya sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif dan efisien, dan juga sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan barang milik daerah, serta ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Penatausahaan barang milik daerah adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik untuk melihat apakah instansi pemerintah baik, tidak hanya dilihat dari kondisi eksternal atau fisiknya saja, tetapi contoh terlihat pada bangunan, gedung atau perkembangan fisik lainnya. Selain itu, ada satu faktor terpenting untuk melihat perkembangan instansi pemerintah yang berada dalam pengelolaan barang milik daerah atau aset milik daerah. Barang milik daerah atau kekayaan yang dimiliki oleh instansi pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Labolo (2014: 23) memberikan penjelasan bahwa pemerintah menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur, semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilih suara (Voters) maupun para pekerja workers.

Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang menggunakan dan memanfaatkan guna menunjang berjalannya tugas dan fungsi tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dijelaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Penatausahaan barang milik daerah adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik untuk melihat apakah instansi pemerintah baik, tidak hanya dilihat dari kondisi eksternal atau fisiknya saja, tetapi contoh terlihat pada bangunan, gedung atau perkembangan fisik lainnya. Selain itu, ada satu faktor terpenting untuk melihat perkembangan instansi pemerintah yang berada dalam pengelolaan barang milik daerah atau aset milik daerah. Barang milik daerah atau kekayaan yang dimiliki oleh instansi pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Sinurat (2018: 269) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga atas segala tindakannya yang ditujukan kepada yang memberi wewenang. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan kabupaten kutai kartanegara, ada beberapa temuan atau bisa disebut sebuah masalah yang terjadi tepatnya pada penatausahaan barang milik daerah, temuan pertama terjadi pada pembukuan barang milik daerah yang belum selesai dengan kebijakan akuntansi atas aset tetap, lebih spesifiknya pada gedung dan bangunan yang belum dikapitalisasi ke aset induk pada Kartu Inventaris Barang (KIB) C dan dicatat secara gabungan, setelah itu pada mekanisme kegiatan inventarisasi barang milik daerah yang belum memadai pada organisasi perangkat daerah tertentu, terakhir pada pelaporan barang

pengguna dan laporan barang milik daerah yang belum memadai untuk penyusunan neraca karna hanya 12 organisasi perangkat daerah dari 59 organisasi perangkat daerah yang menyampaikan hasil rekonsiliasi dengan benar.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Isu penting yang sering Pemerintah Daerah hadapi dalam penatausahaan barang milik daerah adalah penyimpangan administrasi, seperti pengaturan inventarisasi aset, kegagalan untuk menetapkan karakteristik kepemilikan yang sesuai, kegagalan untuk memantau pengalihan aset, dan pembatasan kemampuan aset diakhir masa pakai. status penguasaan aset lemah, dan tidak akan diberikan perpanjangan, bahkan hilangnya Surat Tanda Nomor Kendaraan. Pada saat yang sama, pengelolaan barang atau aset daerah merupakan jantung dari siklus pengelolaan aset. Jika dicermati, dan memang dalam hal tersebut, sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk menentukan secara jelas berapa aset yang mereka miliki.

**Tabel 1.1 Rincian Aset Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Aset Lancar	976.704.093.823	1.975.076.020.924	2.169.348.999.429	1.706.751.203.408	1.251.626.335.344
Investasi Jangka Panjang	844.013.233.334	627.047.649.111	735.136.203.921	745.271.661.175	707.925.027.316
Aset Tetap	15.188.217.467.467	14.563.192.350.546	14.466.630.766.514	14.548.663.379.759	14.244.683.014.330
Aset Lainnya	620.419.311.379	407.068.211.799	487.418.988.554	522.009.772.349	513.625.213.438
Jumlah	17.629.354.106.005	17.572.384.232.381	17.858.534.958.420	17.552.696.016.692	16.717.859.590.430

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah aset Kabupaten Kutai Kartanegara tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan ataupun penurunan, pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar (0,32%) pada jumlah aset, selanjutnya pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan jumlah aset sebesar 1,63%, dan pada tahun 2019-2020 kembali mengalami penurunan sebesar (1,88%) pada aset yang tercatat serta pada tahun 2020-2021 aset pada Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan sebesar (-4,59%) dari pada tahun sebelumnya. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan kabupaten kutai kartanegara, ada beberapa temuan atau bisa disebut sebuah masalah yang terjadi tepatnya pada penatausahaan barang milik daerah, temuan pertama terjadi pada pembukuan barang milik daerah yang belum selesai dengan kebijakan akuntansi atas aset tetap, lebih spesifiknya pada gedung dan bangunan yang belum dikapitalisasi ke aset induk pada Kartu Inventaris Barang (KIB) C dan dicatat secara gabungan, setelah itu pada mekanisme kegiatan inventarisasi barang milik daerah yang belum memadai pada organisasi perangkat daerah tertentu, terakhir pada pelaporan barang pengguna dan laporan barang milik daerah yang belum memadai untuk penyusunan neraca karna hanya 12 organisasi perangkat daerah dari 59 organisasi perangkat daerah yang menyampaikan hasil rekonsiliasi dengan benar.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atas penatausahaan barang milik daerah dari beberapa wilayah pemerintah daerah merupakan pedoman penulis untuk turun melaksanakan penelitian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pertama, Dalam Tesis yang ditulis oleh Daniel Sari Patontongan pada tahun 2020 dengan Judul Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan Kawan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Toraja Utara yang melakukan penelitian dengan variabel Penatausahaan Barang Milik Daerah dan menggunakan Metode Kualitatif, dari hasil penelitian tersebut mendapatkan hasil temuan pada pembukuan, terdapat dalam penatausahaan masih menggunakan sistem manual, inventarisasi barang milik daerah belum terlaksana dengan baik dan belum adanya penandaan kode produk inventaris untuk semua barang milik daerah, sedangkan pelaporan tidak dilakukan dengan benar, dan laporan dari pengurus barang sering terlambat. Kedua, jurnal yang ditulis oleh Sierfi Rahayu pada tahun 2021 yang mengambil variabel tentang pengelolaan aset daerah serta menggunakan metode kualitatif, dalam penelitian Sierfi Rahayu terdapat temuan dalam sektor pemanfaatan aset daerah belum bisa untuk meningkatkan nilai serta tahapan pengelolaan aset

terhambat dalam masa pandemi covid-19 dan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengelolaan aset tersebut, persamaan dari penelitian tersebut pada Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif, dan pada perbedaannya ada pada Lokus Penelitian dan Variabel Pengelolaan Aset Daerah. Ketiga, Mambang Fadli penulis jurnal yang diterbitkan pada tahun 2018 tentang Analisis Pengelola Barang Milik Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penelitian yang di ambil dalam kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan variabel Pengelolaan Barang Milik Daerah dan metode Kualitatif dan mendapatkan hasil temuan yaitu, bahwa pengelolaan aset sudah mengacu atau berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2010, namun penerapan tersebut masih belum maksimal, dan persamaan pada penulisan tersebut yaitu pada Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif sedangkan perbedaannya Lokus Penelitian, teori yang digunakan dan Variabel Pengelola Barang Milik Daerah. Keempat, Wini Widiaty pada tahun 2021 menerbitkan jurnal tentang Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di mana Wini Widiaty mengambil variabel Penatausahaan Aset daerah dan Kualitas Laporan dan menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif, dari hasil penelitian yang dilakukan penerapan manajemen aset tetap di SKPD kabupaten bandung telah dilaksanakan dengan baik, untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, dalam penelitian tersebut persamaan ada pada Variabel Penatausahaan Aset tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan perbedaannya adalah pada Lokus Penelitian dan Teori yang digunakan. Kelima, Fenny Alfianti melakukan penelitian yang berjudul Optimalisasi Penilaian Aset Tetap dalam Mewujudkan Wajar Tanpa Pengecualian (Studi Pada DPKAD Kabupaten Bangka Selatan) yang dilakukan pada tahun 2015 mengambil variabel Optimalisasi Aset tetap dan metode penelitian Kualitatif, dari penelitian tersebut terdapat hasil temuan yaitu, bahwa pengelolaan aset masih belum optimal namun DPKAD telah berusaha menerapkan pendapat tanpa syarat atas optimalisasi aset di Kabupaten Bangka Selatan, persamaan pada penelitian di atas menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dan teori Optimalisasi, sedangkan perbedaannya adalah pada Lokus Penelitian dan Variabel yang digunakan yaitu Penilaian Aset Tetap.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni akan melihat apakah Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kutai Katanegara sudah optimal, dan hasilnya dapat dijadikan acuan untuk perbaikan pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai Katanegara kedepannya. Penelitian ini nantinya akan menggunakan analisis dengan 3 (tiga) dimensi yaitu: Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan. Selain itu Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sudah Optimal atau Belum.

II. METODE

Penulis pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan metode dalam pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Peneliti menyajikan data keuangan dan data barang milik yang kemudian dianalisis dalam bentuk deskripsi. Data yang digunakan tidak ditampilkan sebagai penguji teori maupun hipotesis sebagaimana fungsi data statistik pada penelitian kuantitatif. Namun, data statistik yang disajikan tersebut digunakan penulis sebagai bahan untuk menjelaskan keadaan atau gambaran objek yang diteliti. Sugiyono (2017: 9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat Positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (Sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Creswell (2013: 267) berpendapat bahwa observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi struktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu person (informan) sebagai pendukung dengan melakukan wawancara bersama pihak-pihak terkait. Kemudian, sumber data

sekunder yang dipakai penulis yaitu paper (dokumen) yang merupakan sumber data berupa dokumendokumen sebagai pendukung sumber data primer. Dokumen yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017-2021, laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017-2021, dokumentasi foto kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah aspek kinerja, dan dokumentasi – dokumentasi lain yang dianggap layak untuk penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini membahas mengenai deskripsi serta analisis data yang diperoleh peneliti pada koleksi primer dan sekunder yang dilakukan di lapangan. Data utama penelitian ini adalah hasil wawancara dengan orang dalam. Data tersebut merupakan data utama dalam analisis, dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait untuk memperkuat dan memperdalam hasil analisis. Hasil penelitian tersebut menjelaskan optimalisasi penatausahaan barang milik daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hambatan optimalisasi penatausahaan barang milik daerah, dan upaya penyelesaian hambatan optimalisasi penatausahaan barang milik daerah untuk mencapai akuntabilitas laporan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan penatausahaan barang milik daerah yang terbagi 3 (tiga) dimensi pembukuan, inventarisasi, pelaporan pada daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan teori yang dikemukakan oleh (Moermahadi, 2017) yaitu sebagai berikut:

3.1 Optimalisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah

Secara umum penatausahaan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti peraturan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang terdiri dari:

1. Pembukuan yaitu proses pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventarisasi barang serta dalam daftar barang milik daerah.
2. Inventarisasi yaitu kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data, dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.
3. Pelaporan yaitu proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan.

a. Pembukuan

Permasalahan yang ditemukan oleh penulis yaitu aset tanah yang masih belum bersertifikat lalu ada kendaraan dinas yang masih menjadi barang milik daerah dalam penelusuran dikarenakan beberapa kendaraan dinas yang tidak terlacak, sebagai berikut:

Tabel 1
Data Aset Tanah yang belum memiliki sertifikat

No	Status Legalitas	Bidang Tanah
1	Sertifikat	446
2	Belum Sertifikat	2153
Total Tanah		2599

Sumber: Kartu Inventaris Barang

Tabel 2
Data Kendaraan yang terdata

No	Status Legalitas	Kendaraan Dinas
1	Tercatat	4157
2	Dalam Penelusuran	1160
Total Kendaraan Dinas		5317

Sumber: Kartu Inventaris Barang

Tabel 3
Data Aset Dalam Penelusuran

Tahun	Nilai (Rp)
2018	1.005.561.840
2019	528.000.000
2020	3.990.000
2021	-

Sumber: LKPD Tahun 2018-2021

Tabel 4
Data/Informasi Aset Tetap yang belum dicatat secara lengkap

No	Uraian	Informasi yang tidak lengkap
(1)	(2)	(3)
1	KIB A – Tanah	Luas, Penggunaan, dan Nomor Sertifikat
2	KIB B – Peralatan dan Mesin	Merk, Tipe Lokasi dan Nomor BPKB
3	KIB C – Gedung an Bangunan	Lokasi, Luas Bangunan, Dokumen Hedung/Tahun Perolehan, dan Status Tanah
4	KIB D – Jalan, Irigasi dan Jaringan	Luas (Panjang dan Lebar Jalan), Lokasi, Dokumen Jalan/Tahun Perolehan
5	KIB E – Aset Tetap Lainnya	Buku (Judul dan Spesifikasi), Hewan Ternak (Jenis dan Ukuran)
6	KIB F – Konstruksi Dalam Pengerjaan	Lokasi, Dokumen Pengadaan/Tahun Perolehan dan Tahun Mulai Pembangunan

Sumber: Kartu Inventaris Barang Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada **Tabel 1** dan **Tabel 2** Barang Milik Daerah yang masih bermasalah yaitu ada pada aset tanah yang masih banyak yang hilang ataupun belum memiliki sertifikat, lalu ada kendaraan dinas yang masih dalam penelusuran kenapa dalam penelusuran dikarenakan kendaraan dinas yang dibawa oleh pejabat-pejabat pada Kabupaten Kutai Kartanegara ini sering dibawa oleh pejabat itu sendiri apabila pejabat itu mendapat mutasi ataupun pensiun jadi kendaraan dinas itu tidak langsung ditarik oleh pengurus barang pada organisasi perangkat daerah tersebut oleh karena itu kendaraan dinas itu masih teroper-oper atau terlempar dari tangan satu ke tangan yang lain sehingga masih menjadi aset dalam penelusuran.

Pada **Tabel 3** dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintahan yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya, aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjampakaikan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan.

Pada **Tabel 4** bahwa pada SIMDA BMD pencatatan barang milik daerah masa lalu banyak yang tidak lengkap atau tidak sepenuhnya dicatat oleh karena itu barang milik daerah yang telah tercatat akan

tetapi tidak rinci seperti belanja komputer diatas tersebut akan dimasukan kedalam aset dalam penelusuran karena masih akan ditelusuri kemana barang milik daerah itu berpindah, seperti sekretariat daerah terkait aset dalam penelusuran itu bernilai 3 sekian milyar yang mana aset tersebut berupa kendaraan roda dua semua, sampai sekarang sangat sulit untuk menelusuri hal tersebut.

b. Inventarisasi

Inventarisasi barang milik daerah bukanlah suatu tindakan yang sekedar formalitas belaka, pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses inventarisasi dilakukan secara benar, sistematis, dan terus-menerus, serta memastikan bahwa data yang terkumpul dapat diandalkan dan terdokumentasi dengan baik, akan tetapi terdapat kendala pada inventarisasi barang milik daerah pada Kabupaten Kutai Kartanegara, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Khalfi Arema selaku Staff pada Sub Bidang Inventarisasi dan Dokumentasi Aset Daerah Pada hari Senin, 16 Januari 2023 penulis mendapatkan informasi bahwa:

“Sering terjadi permasalahan setiap tahunnya itu pada saat rekonsiliasi terdapat pada saat belanja yang tercatat pada sistem itu hanya judul saja tidak ada rinciannya, dan juga selalu tidak adanya sikron antara Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan yang dibelanjakan jadi apa yang direncanakan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan barang yang dibelanjakan itu berbeda, misalnya pada suatu organisasi perangkat daerah membeli 10 komputer yang terdata pada kartu inventaris barang atau SIMDA BMD, 10 komputer ini kondisinya baik akan tetapi pada saat di lapangannya 5 sudah rusak berat jadi pada saat tim penyusunan program ingin mengusulkan untuk membeli 5 komputer masuk Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah kami yang menelaah bingung karena pada inventarisasi 10 komputer tersebut masih dalam keadaan baik seharusnya Pengurus Barang pada organisasi perangkat daerah tersebut melakukan update terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian 5 komputer lagi”.

c. Pelaporan

**Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2018-2021**

Uraian	31 Des 2018	31 Des 2019	31 Des 2020	31 Des 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah	2.187.889.719.682	2.212.380.067.117	2.240.630.006.538	2.249.427.568.334
Peralatan dan Mesin	2.118.471.016.751	2.261.551.197.893	2.457.855.731.829	2.654.736.744.278
Gedung dan Bangunan	5.481.823.165.111	5.671.658.508.119	6.283.566.739.252	6.408.992.395.786
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.972.648.801.158	12.711.885.815.115	13.352.905.335.388	13.751.586.316.772
Aset Tetap Lainnya	485.202.535.973	438.620.894.865	442.718.523.577	444.589.681.398
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.685.670.611.412	1.640.041.109.773	1.401.719.528.879	1.492.457.170.468
Akumulasi Penyusutan	(9.368.513.499.542)	(10.469.506.826.409)	(11.630.732.485.706)	(12.757.106.862.708)
Jumlah	14.563.192.350.546	14.466.630.766.514	14.548.663.379.759	14.244.683.014.330

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2018-2021

Pada tabel di atas merupakan rincian aset tetap pada kabupaten kutai kartanegara, aset tetap tahun 2018 dan 2019 setelah ditotalkan dengan pengurangan pada akumulasi penyusutan Aset tetap tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan sebesar 0,66% sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan aset tetap sebesar 0,57% lalu pada tahun 2020 dan 2021 aset tetap mengalami penurunan kembali yang lumayan besar dari pada tahun-tahun sebelumnya sebesar 2,09%.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Toni Bowo Satoto, SH selaku Kepala Bidang Aset Daerah Pada hari Senin, 16 Januari 2023 penulis mendapatkan informasi bahwa:

“Laporan Semesteran dan tahunan pada pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, semua kegiatan pelaporan bersifat online melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah, jadi dalam masalah pelaporan tidak pernah ada masalah pada pelaporan selalu tepat waktu dan jelas dalam pelaporan barang milik daerahnya yang akan disampaikan kepada pimpinan di kabupaten kutai kartanegara ini”.

Maka dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan pelaporan barang milik daerah terlaksana dengan baik dan tidak adanya kendala pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terutama pada bidang Aset Daerah karena sudah dilakukan dengan regulasi yang ada.

3.2 Hambatan Optimalisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Berikut adalah tabel pegawai yang berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan pendidikan terakhirnya, sebagai berikut:

Tabel 1
Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenjang Pendidikan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

NO	Jenjang Kesarjanaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	SLTA	98 Orang
2	Pasca Sarjana	12 Orang
3	Sarjana Ekonomi	27 Orang
4	Sarjana Ilmu Administrasi Negara	19 Orang
5	Sarjana Agronomi	1 Orang
6	Sarjana Sistem Informasi	2 Orang
7	Sarjana Tata Buku	1 Orang
8	Sarjana Ilmu Sosial Politik	2 Orang
Jumlah		162 Orang

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2022

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ade Prima Suryanata selaku Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Dokumentasi pada hari Senin, 16 Januari 2023 Penulis mendapatkan informasi bahwa:

“Sumber daya manusia yaitu pengurus barang memang dapat dibilang pada Kabupaten Kutai Kartanegara ini bukan dari keinginan dari pegawai tersebut melainkan ditunjuk oleh pimpinan organisasi perangkat daerah oleh karena itu, pengurus barang pada setiap organisasi ini tidak melaksanakan tugas secara maksimal dikarenakan sepengetahuan pegawai menjadi pengurus barang itu susah karena penatausahaan Barang Milik Daerah itu tidak berhenti di akhir tahun, apabila keuangan pada saat melaporkan keuangan di akhir tahun sudah selesai lalu ada anggaran baru lagi sedangkan Barang Milik Daerah berkelanjutan, sampai barang itu rusak berat dan dihapuskan masih menjadi tanggung jawab pihak daerah, jadi pegawai merasa susah untuk menerima untuk menjadi pengurus barang, karena pengurus barang mempunyai tugas untuk mencatat barang-barang yang dibelanjakan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan tapi kendala yang sering ditemui ini adalah pengurus barang susah untuk mendapat data dari pejabat pelaksana teknis kegiatan, dikarenakan output dari pencatatan adalah Kartu Inventaris Barang disana masih banyak form-form yang kosong

contoh ada merk tipe mesin untuk peralatan mesin, untuk gedung dan bangunan seharusnya ada izin mendirikan bangunan, misalnya jalan itu panjangnya berapa itu harus terdokumentasi, sekarang kondisinya memang masih banyak yang kosong seharusnya dari atas itu harus sudah mendukung supaya pengurus barang itu kerjanya mudah dapat datanya mudah”.

b. Motivasi

Tidak semua pegawai negeri memiliki motivasi yang sama. Beberapa pegawai mungkin lebih termotivasi dibandingkan yang lain, sehingga perlu adanya strategi khusus untuk meningkatkan motivasi mereka. Selain itu, kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi motivasi pegawai. Sebagai contoh, kebijakan yang merugikan atau tidak adil dapat menurunkan motivasi pegawai, sementara kebijakan yang memberikan penghargaan dan insentif dapat meningkatkan motivasi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ade Prima Suryanata selaku Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Dokumentasi pada hari Senin, 16 Januari 2023 Penulis mendapatkan informasi bahwa:

“Karena sekarang berbeda dulu ada 2 orang pengurus barang dan penyimpan barang, lalu tugas itu dilimpahkan semua ke pengurus barang jadi beban kerja berat sedangkan insentif yang diberikan kurang sehingga membuat para pengurus barang melakukan kerja sesuai dengan insentif yang diberikan karena tidak sepadannya beban kerja yang diterima dan yang dikerjakan”.

c. Regulasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ade Prima Suryanata selaku Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Dokumentasi pada hari Senin, 16 Januari 2023 Penulis mendapatkan informasi bahwa:

“Jadi seharusnya peraturan yang baru tersebut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 ini seharusnya sudah digunakan pada tahun 2023 namun pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri itu baru mau kami laksanakan pada tahun 2023 ini dikarenakan pada ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 itu harus diturunkan dulu ke Peraturan Bupati baru akan dilaksanakan jadi sementara itu kami masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 meskipun pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 itu hanya membahas 3 aspek yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan selebihnya pada perencanaan dan lain-lain masih pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 mungkin akan diturunkan ke Peraturan Bupati pada tahun 2023 dan juga kemungkinan pada tahun 2024 baru akan digunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 secara utuh dikarenakan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 dengan format-format yang panjang itu seharusnya menggunakan eBMD, kalau melakukan secara manual tidak akan dapat dikerjakan dan tidak sesuai dengan format yang berada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021”.

d. Aplikasi SIMDA BMD

SIMDA BMD memang sangatlah membantu para pengelola barang milik daerah dalam menjalankan tugasnya, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan. Pada aplikasi tersebut masih terdapat penyajian informasi masih kurang dan belum lengkap, seperti tidak adanya informasi suatu gedung yang berada di atas tanah pemerintah selain masalah tersebut, error kadang terjadi ketika melakukan input dan menampilkan data barang dengan jumlah banyak serta saat proses mutasi dan penghapusan barang. masalah tersebut sangatlah mengganggu proses penatausahaan barang milik daerah dan bisa berakibat pada buruknya kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.3 Upaya Penyelesaian Hambatan Optimalisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melalui program pengembangan pegawai yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, pelatihan merupakan proses yang disusun untuk dapat mengubah pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman belajar untuk mencapai kinerja yang lebih efektif dalam sebuah kegiatan termasuk pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah. Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan pegawai baik dalam keterampilan jenis pekerjaan yang diketahui dan memperdalam bidang tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ade Prima Suryanata selaku Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Dokumentasi Aset Daerah Pada hari Senin, 16 Januari 2023 penulis mendapatkan informasi bahwa:

“Untuk meningkatkan motivasi pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan setiap tahun melakukan bimbingan teknis secara perlahan, tidak semuanya kurang sumber daya manusia, cuman ada beberapa organisasi perangkat daerah yang jarang atau kurang peka terhadap tugasnya sebagai pengurus barang, kedua memang adanya organisasi perangkat daerah raksasa atau organisasi perangkat daerah yang penganggarannya besar misalnya dinas kesehatan, dinas pendidikan, pekerjaan umum, selain dengan kondisi khus tersebut padahal setiap tahun kami selalu melakukan bimbingan teknis tapi dilihat dari proses masih terlihat lambat”.

b. Motivasi

Motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak atau bekerja, motivasi para pegawai sangat penting karena mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan publik, pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan upaya untuk meningkatkan motivasi para pegawai seperti meningkatkan kesejahteraan, peningkatan lingkungan kerja, pemberian penghargaan atas kinerja yang baik, kesempatan pengembangan karir dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ade Prima Suryanata selaku Kepala Bidang Inventarisasi dan Dokumentasi Aset Daerah Pada hari Senin, 16 Januari 2023 penulis mendapatkan informasi bahwa:

“Motivasi dari atasan kemaren kami coba pada saat dalam rapat koordinasi pimpinan bapak sekretaris daerah memberikan arahan untuk pada tiap tahunnya pada penatausahaan barang milik daerah itu ada pencapaian, misalnya tahun ini penertiban aset tahun depan mungkin perencanaan dalam rencana kebutuhan barang milik daerah jadi mau tiap tahun itu ada *milesstonenya* dari pada rapat koordinasi kami minta pada tiap organisasi perangkat daerah untuk menyampaikan aset yang dimilikinya jadi dengan harapan kepala organisasi perangkat daerah itu *aware* atau peduli dengan aset yang dikuasai pada tiap organisasi perangkat daerah tersebut, itu pelan-pelan kami edukasi para pimpinan supaya sadar akan kepunyaan aset tersebut lalu kami juga menyampaikan apa saja keluhan keluhan pada pengurus barang kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, lalu pada saat rapat koordinasi sudah disampaikan kepada inspektorat yang bertanya kenapa pengurus barang tidak selalu maksimal dalam menjalankan tugasnya lalu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memberikan pernyataan seperti ini insentif yang kurang sehingga motivasi kerja yang tidak kuat dikarenakan tidak sepadannya dengan beban kerja mereka sampai saat ini memang kami dapat saran dari inspektorat untuk diajukan kepada sekretaris daerah untuk dikeluarkan kebijakan agar mendapatkan lebih dikarenakan beban kerja yang berat namun harus melalui persetujuan bupati akan tetapi ini belum kami lakukan”.

c. Regulasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Toni Bowo Satoto, SH selaku Kepala Bidang Aset Daerah Pada hari Senin, 16 Januari 2023 penulis mendapatkan informasi bahwa:

“Menyempurnakan regulasi yang ada, dan menyusun regulasi untuk hal-hal tertentu yang belum terinci dalam regulasi dan sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi. Masih ada beberapa peraturan pengelolaan barang milik daerah yang sedang disusun yaitu Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah yang mengatur secara rinci tentang siklus pengelolaan barang milik daerah. Namun, untuk statuta yang lebih tinggi, telah disahkan statuta terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021, yang akan diturunkan tahun ini untuk Kabupaten Kutai Kartanegara dan kemungkinan dapat dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2024”.

d. Aplikasi SIMDA BMD

Permasalahan yang muncul akibat dari kesalahan sistem SIMDA BMD tentunya sangat berpengaruh terhadap proses penatausahaan barang milik daerah, untuk mengantisipasinya terjadinya kendala dan permasalahan yang sama pemerintah akan terus selalu melakukan pembaruan sistem aplikasi SIMDA BMD, pembaruan aplikasi SIMDA bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sukotjo, SE selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Pada hari Senin, 16 Januari 2023 penulis mendapatkan informasi bahwa:

“Para pengguna aplikasi SIMDA BMD terutama pada sub bidang inventarisasi dan dokumentasi aset telah berkoordinasi secara cepat kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menangani masalah SIMDA BMD, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan prosesnya penatausahaannya akan mengikuti prosedur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 pada

tahun ini, yang tentunya dengan update terbaru aplikasi SIMDA BMD akan kompatibel dengan regulasi yang baru ini”.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada Penatausahaan Barang Milik Daerah terdapat 3 Dimensi yaitu: Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, pada penelitian ini terdapat temuan utama penelitian, pada pembukuan terdapat temuan pada aset tanah yang masih belum memiliki sertifikat sebesar 2153 tanah dari total 2599 tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu adanya kendaraan dinas yang tidak terlacak atau tidak diketahui keberadaannya sekitar 1160 kendaraan dinas dari 5317 kepemilikan kendaraan dinas, pada pembukuan masih terdapat data/informasi aset yang belum dicatat secara jelas dan rinci, dapat dilihat pada tabel 4 untuk melihat secara rinci dalam Kartu Inventaris Barang.

Pada Inventarisasi sering terjadinya rekonsiliasi banyak yang tercatat pada pembelian barang milik daerah hanya judul saja tidak rinciannya dan juga selalu tidak adanya sinkronisasi antara rencana kebutuhan barang milik daerah dengan yang dibelanjakan, ini pengaruh dari pembukuan atau pada tahap sebelumnya yang kurang tepat.

Pada Pelaporan dapat dikatakan sudah baik dan tidak ada temuan atau masalah akan tetapi apabila pada pembukuan dan inventarisasi mengalami permasalahan maka akan berkelanjutan pada saat pelaporan dikarenakan akan adanya barang milik daerah yang dipertanyakan wujud dan keberadaannya.

IV. KESIMPULAN

Optimalisasi penatausahaan Barang Milik Daerah pada Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berjalan dengan baik dan optimal, walaupun masih terdapat beberapa hambatan dan permasalahan, hambatan tersebut yaitu: Sumber Daya Manusia masih relative rendah, kurangnya motivasi dan koordinasi dari atasan, peraturan yang berlaku, aplikasi SIMDA BMD yang masih terjadi error, lalu pada bentuk penyelesaiannya yaitu: Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis berkala setiap tahun, memberikan honorarium lebih sesuai beban kerja, Menyusun peraturan terbaru tentang penatausahaan barang milik daerah, dan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk perbaikan *bug* dan *error*.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian, penelitian juga hanya dilakukan pada satu OPD saja sebagai model studi kasus yang dipilih sesuai dengan teori yang digunakan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan kepada rekan-rekan lainnya agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan optimalisasi penatausahaan barang milik daerah Kabupaten Kutai Kartanegara agar bisa menemukan hasil yang lebih mendalam dan dapat melihat perkembangan kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada bapak Kepala Badan BPKAD beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing peneliti.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John Ward. 2013. *Qualitative Inquiry and Reasearch Design*. Los Angeles: SAGE Publik.
- Labolo, M. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sinurat, Marja, dan Horas Maurits Panjaitan. 2017. *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Sinurat, Marja, dkk. 2019. *Cara Cerdas dan Mahir 456 Tanya Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Moermahadi, Djanegara. 2017. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan*. Bogor: Kesatuan Press.
- Patotongan, Sari Daniel. 2020. *Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan Kawan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Toraja Utara*. Thesis

Rahayu, Sierfi. 2021. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah di Pemerintah Kabupaten Lebak*. Jurnal: EMBA 4.

Fadli, Mambang. 2018. *Analisis Pengelola Barang Milik Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur*. Jurnal: EMBA 4.

Widiaty, Widi. 2021. *Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Jurnal Akuntansi.

Alfianti, Fenny. 2015. *Optimalisasi Penilaian Aset Tetap Dalam Mewujudkan Wajar Tanpa Pengecualian (Studi pada DPKAD Kabupaten Bangka Selatan)*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

